

OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BUMN SEKTOR PERBANKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PNBP

Optimization of Income in the Banking Sector SOE Income as an Effort to Increase PNBP

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the inadequate income of state-owned enterprises (BUMN) in the banking sector and the government's efforts to strengthen these enterprises to increase Non-Tax State Revenues (PNBP). This research is a descriptive quantitative research. The study results show that state-owned enterprises in the banking sector need to improve financial performance to increase PNBP of Separated State Assets (KND). The results showed that this study had passed the classic assumption test. The F test shows that the independent variables simultaneously affect the dependent variable with a significant value of 0.000. The study shows that return on assets/ROA (X_1) affects DPR (Y), ROA has a positive effect on DPR. While the variable capital adequacy ratio/CAR (X_2) affects the DPR (Y). CAR has a positive effect on DPR. Realization of PNBP KND in 2017/2018, 2018/2019, and 2019/2020 always exceeded the target of Non-Tax State Revenues of Separated State Assets (PNBP KND).

Keywords: *dividend yields ratio, Non-Tax State Revenues (PNBP), BUMN profits, dividends for the government, State Owned Enterprise (SOE)*

1. Pendahuluan

Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia disusun dengan konsep anggaran defisit. Defisit APBN tahun 2020 sebesar -1.039,22 triliun meningkat 234,87 persen dibandingkan defisit tahun 2015 sebesar -310,33 triliun (Tabel 1). Defisit negara disebabkan oleh kebijakan belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara akibat perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terlebih lagi, pada tahun 2020 pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang menyebabkan belanja negara semakin meningkat melebihi pendapatan negara. Rasio belanja

negara tahun 2015-2020 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,6-16,7 persen. Sedangkan rasio pendapatan negara tahun 2015-2019 sebesar 10-14 persen terhadap PDB. Peningkatan belanja negara seharusnya diimbangi dengan pendapatan negara agar defisit APBN tidak semakin melebar.

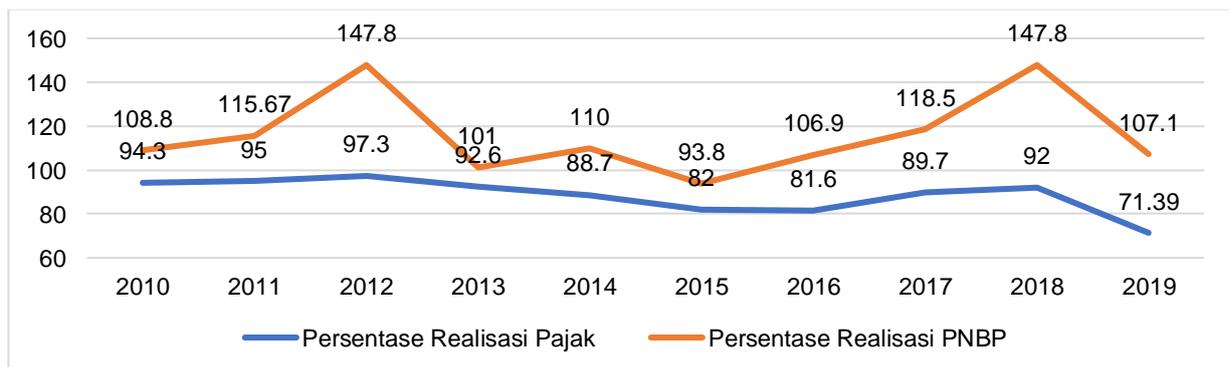
Tabel 1. Perkembangan Defisit APBN tahun 2015-2019 (dalam triliun Rp)

	Perpres 72/2020	LKPP 2019	LKPP 2018	LKPP 2017	LKPP 2016	LKPP 2015
Pendapatan Negara & Hibah	1.699,94	1.943,67	1.928,1	1.654,7	1.546,9	1.496
Belanja Negara	2.739,16	2.213,11	2.220,65	2.007,35	1.864,27	1.806,33
Surplus (Defisit) Anggaran	-1.039,22	-269,44	-292,55	-352,65	-317,37	-310,33

Sumber: Kemenkeu, diolah

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan menetapkan target penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN. Target penerimaan pajak dalam satu dekade masih di bawah target APBN. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak dari sektor migas yang disebabkan oleh melemahnya harga minyak dunia pada semester pertama tahun 2019, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu instrumen stimulus perekonomian, dan pertumbuhan restitusi pajak yang cukup tinggi. Di sisi lain, perkembangan kinerja realisasi PNBP memiliki kinerja yang positif melebihi target, kecuali untuk tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan peran PNBP sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Tahun 2010-2019 (dalam persen)

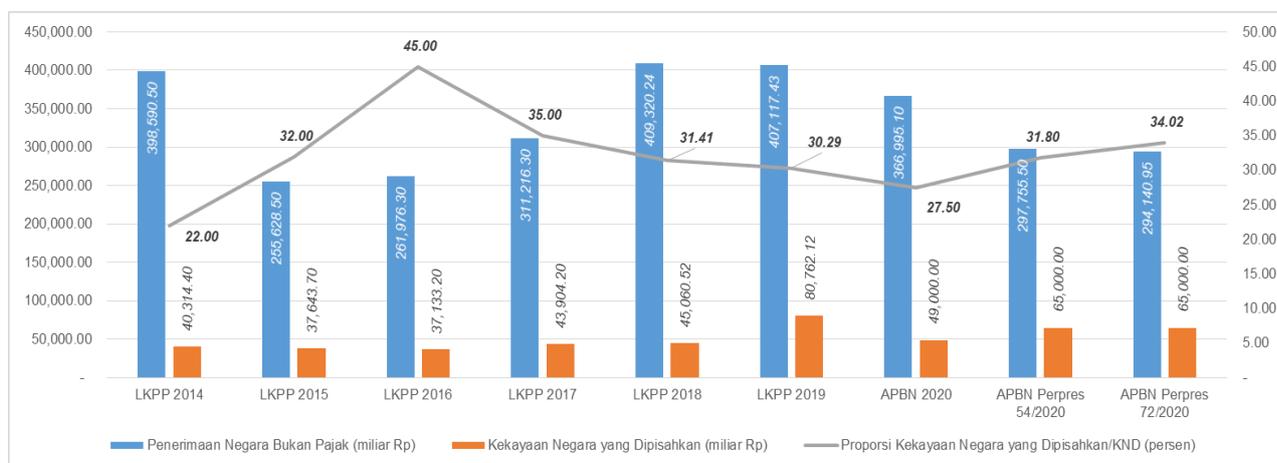


Sumber: Kemenkeu, diolah

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, realisasi PNBP Semester 1 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari targetnya dalam Perubahan APBN Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2020 atau tumbuh sebesar negatif 11,8 persen. Salah satu yang menyebabkan menurunnya realisasi PNBP pada semester 1 2020 yaitu berasal dari turunnya PNBP pengelolaan Kekayaan

Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar 32,7 persen pada realisasi semester 1 tahun 2020 yang dipengaruhi oleh di antaranya kinerja penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih rendah karena adanya penundaan RUPS BUMN khususnya Non Himbara dan penerimaan sisa Surplus BI yang terealisasi pada semester 1 tahun 2020 sebesar Rp21,5 triliun lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar Rp30,1 triliun. Di sisi lain, terjadi penurunan realisasi semester 1 tahun 2020 terhadap PNBPN sumber daya alam (SDA) yang disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah, *lifting*, dan harga komoditas sebagai penopang utama penerimaan SDA yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

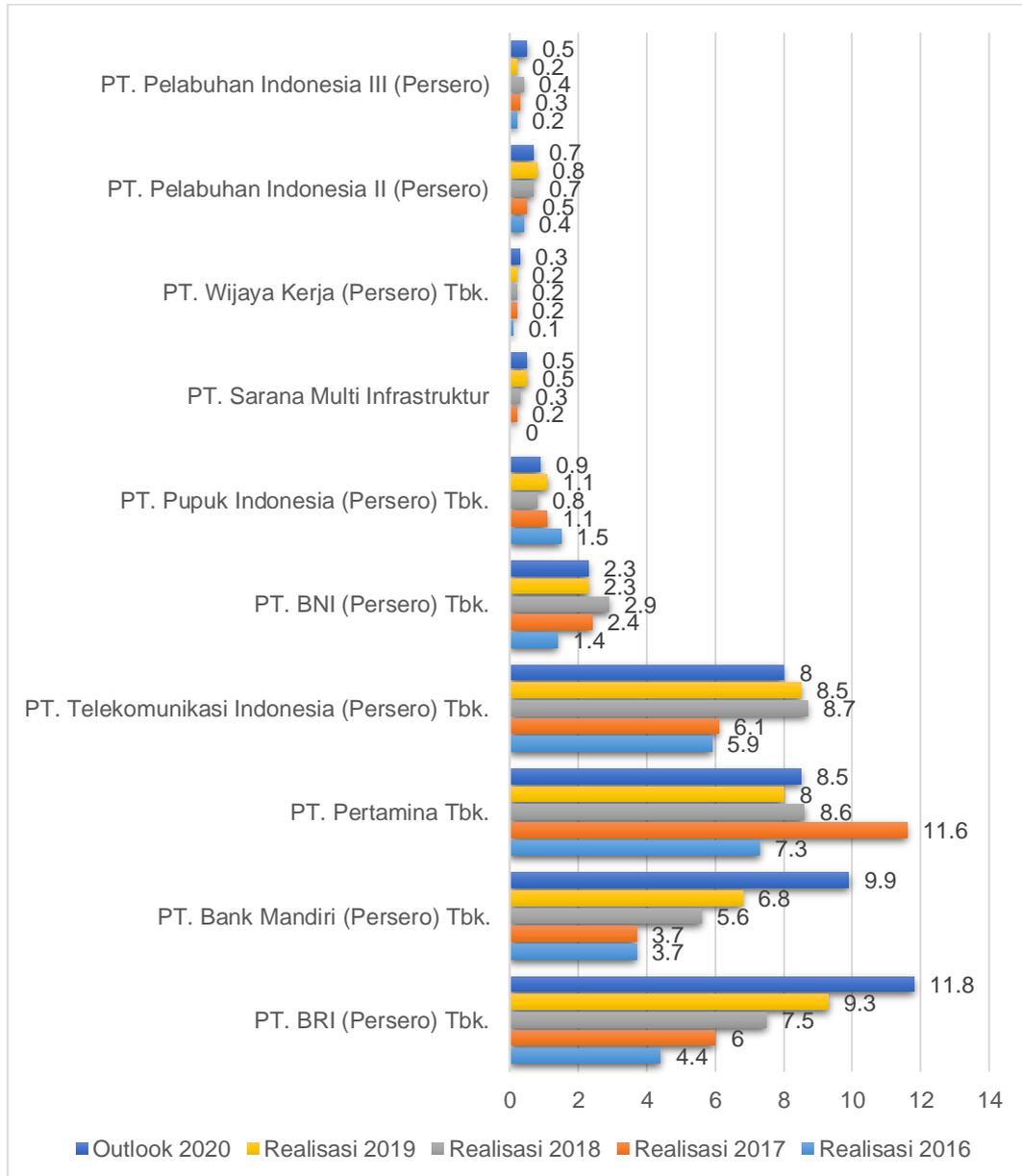
Gambar 2. PNBPN Kekayaan Negara Yang Dipisahkan/KND



Sumber: Kementerian Keuangan, berbagai tahun, diolah

PNBPN dari pengelolaan KND terdiri atas pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN yaitu berupa dividen yang menjadi bagian pemerintah dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN berupa dividen bagian pemerintah merupakan kontributor terbesar dalam akun pendapatan dari KND tersebut, sedangkan pendapatan dari KND lainnya antara lain berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI), pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nota Keuangan APBN TA 2020 ditetapkan target PNBPN dari hasil pengelolaan KND sebesar Rp49,00 triliun. PNBPN bagian pemerintah atas laba BUMN 10 terbesar tahun 2016-2020 di antaranya berasal dari dividen bagian pemerintah dari BUMN sektor perbankan yaitu sebesar Rp19,83 triliun atau 40,48 persen dari target PNBPN dari hasil pengelolaan KND dalam Nota Keuangan APBN TA 2020 (Gambar 3). Berdasarkan Nota Keuangan dalam APBN TA 2020, target PNBPN bagian pemerintah dari sektor perbankan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Dengan demikian, keempat BUMN perbankan dimaksud akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target PNBPN dari hasil pengelolaan KND TA 2020.

Gambar 3. PNBP Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN 10 Terbesar 2016-2020 (dalam triliun Rp)



Sumber: Kemenkeu, diolah

Besaran dividen bagian pemerintah (PNBP KND) yang berasal dari laba BUMN) dihitung dengan rumus berikut:

$$PNBP\ KND = Laba\ Bersih\ yang\ Diatribusikan\ ke\ pemilik\ Entitas\ Induk \times DPR \times Persentase\ Kepemilikan\ Saham\ Pemerintah$$

Dimana:

PNBP KND : Dividen bagian pemerintah

DPR : Dividend Payout Ratio

Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik induk merupakan laba bersih yang dalam perhitungannya telah mengeluarkan kepentingan non-pengendali. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik induk dan persentase kepemilikan pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan sebagai alat untuk pengukuran kinerja masa lalu dan memproyeksikan kinerja laba di masa mendatang. Sementara persentase kepemilikan saham menunjukkan porsi kepemilikan saham pemerintah dari total saham yang dimiliki perseroan. *Dividend Payout Ratio* (DPR) atau rasio yang menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham secara tunai (van Home & Wachowicz, 2009). DPR menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas, biasanya untuk periode 1 (satu) tahun buku.

Laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dipengaruhi oleh kinerja keuangan BUMN. Persentase kepemilikan saham pemerintah dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kinerja keuangan. Ada banyak faktor yang memengaruhi DPR menurut hasil penelitian Musiega et.al (2013) dan Rehman & Takumi (2012) di antaranya rasio profitabilitas dan rasio kecukupan modal. Dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula arus kas dalam perusahaan dan diharapkan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi (Ismiyanti dan Mahadwartha, 2005). Menurut hasil penelitian Perpatih (2016) dan Lanawati dan Amilin (2015), ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR sedangkan menurut Silfiana & Rachmawati (2015), ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR. Dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi faktor kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian (Achmad & Kusumo, 2003). Menurut hasil penelitian Purba (2019), CAR berpengaruh signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Hubungan antara CAR terhadap DPR adalah positif, artinya penambahan CAR akan mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan sehingga meningkatkan DPR. Sedangkan menurut Karauan (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap DPR pada bank BUMN yang *go public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank yang memengaruhi laba yang diatribusikan kepada pemilik dan persentase kepemilikan pemerintah, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) dan rasio kecukupan modal (CAR) secara bersama-sama (simultan) terhadap DPR pada bank BUMN, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBPKND atas laba BUMN sektor perbankan agar menemukan formulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBPKND BUMN sektor perbankan karena hasil realisasi selalu lebih besar dari target selama ini. Alasan

dipilihnya sektor perbankan karena PNBP dari hasil pengelolaan KND atas laba BUMN sektor perbankan dalam Nota Keuangan APBN TA 2020 sebesar 40,48 persen dari target PNBP KND.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2018 Tentang PNBP dinyatakan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP terdiri dari PNBP sumber daya alam (SDA), PNBP KND, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

2.2. PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Berdasarkan Nota Keuangan APBN TA 2021, PNBP KND terdiri atas pendapatan pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan pemerintah atas laba BUMN memberikan kontribusi terbesar sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan teknis PNBP dari pengelolaan KND yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal dengan memperhatikan profitabilitas BUMN khususnya BUMN yang memberikan kontribusi dividen terbesar begitu pula, tingkat solvabilitas atau kemampuan pendanaan perusahaan berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *CAR*, *Asset to Liability Ratio*, *Risk Based Capital (RBC)*, dan *Gearing Ratio*. Penentuan dividen BUMN juga perlu memperhatikan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi sehingga tidak menurunkan nilai pasar yang terdaftar di bursa saham dan keberlangsungan usaha BUMN serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. PNBP KND atau dividen yang menjadi bagian pemerintah dihitung dengan rumus:

$$PNBP\ KND = Laba\ Bersih\ yang\ Diatribusikan\ ke\ pemilik\ Entitas\ Induk \times DPR \\ \times\ Persentase\ Kepemilikan\ Saham\ Pemerintah$$

Dimana:

PNBP KND : dividen bagian pemerintah

DPR : *Dividend Payout Ratio*

2.3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa sumber-sumber perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. BUMN dalam kegiatannya menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan siklus ekonomi juga sebagai agen pembangunan yaitu BUMN melakukan upaya pembangunan di segala sektor yang memiliki urgensi tinggi untuk memberikan efek manfaat bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, BUMN juga menyerahkan bagian dari keuntungannya berupa dividen kepada pemerintah sebagai penerimaan negara.

2.4. Dividen

Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham (*shareholder*). Dalam sebuah perseroan, penentuan pembagian dividen (waktu dan besarnya) didasarkan pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan dapat membagi dividen kepada *shareholder* dalam bentuk tunai (*cash dividend*) maupun dalam bentuk saham (*stock dividend*). Dividen sebagai bentuk imbal hasil kepada pemegang saham juga merupakan pengurang ekuitas perusahaan. Pengukuran dividen dalam penelitian menggunakan rumus:

$$\text{Dividend Payout Ratio (DPR)} = \frac{\text{Dividend}}{\text{Earnings}}$$

2.5. Teori Kebijakan Dividen

Beberapa teori yang berkaitan dengan penyusunan target PNBPN, DPR yang berasal dari laba BUMN di antaranya *agency theory*, *bird in the hand theory*, dan *residual dividend theory*.

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Aspek-aspek masalah keagenan selalu dimasukkan ke dalam keuangan perusahaan, karena banyaknya keputusan keuangan yang diwarnai oleh masalah keagenan seperti kebijakan hutang. Teori keagenan mempunyai hubungan dengan kebijakan dividen suatu perusahaan. Suatu ketika apabila tingkat keagenan tinggi maka hal ini dapat menjadi pertanda buruk bagi pemegang saham. Pemegang saham akan mendapatkan dividen yang rendah, hal ini disebabkan manajer akan menggunakan dana-dana secara berlebih dan akan berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan.

b. *The-Bird-In-The-Hand Theory*

Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila DPR rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima laba dibagikan dalam bentuk dividen daripada *capital gains*.

c. Teori Dividen Residual (*Residual Dividends Theory*)

Teori ini menyatakan pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan mempunyai dana sisa dari laba setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki *Net Present Value* positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan (*retained earnings*).

d. Faktor - faktor Yang Memengaruhi Dividen

Faktor yang memengaruhi dividen dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas (ROA) dan rasio solvabilitas (CAR). Hal ini disebabkan ketika melakukan uji asumsi klasik hanya variabel ROA dan CAR yang memenuhi semua uji asumsi klasik. Menurut Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas adalah ROA. Di sisi lain, rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur solvabilitas adalah CAR.

2.6. Pengaruh ROA Terhadap DPR

Dividen diambil dari laba bersih. Oleh karena itu, ROA akan memengaruhi DPR. Perusahaan yang semakin besar keuntungannya (ROA) akan membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai dividen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha1: ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR.

2.7. Pengaruh CAR Terhadap DPR

CAR adalah menunjukkan kesehatan suatu bank, maka bank yang sehat bisa secara signifikan meningkatkan laba yang pada gilirannya akan meningkatkan DPR. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha2: CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR.

2.8. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik atau alat untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan (Darmawi, 2011). Kinerja bank atau kesehatan bank diukur dan dinilai dengan pendekatan rasio keuangan. Adapun rasio-rasio keuangan tersebut antara lain meliputi:

a. Kualitas Aset

Kualitas aset dijelaskan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan persentase komposisi kredit bermasalah dari total kredit yang disalurkan oleh bank. Kredit macet yang dimaksud dalam hal ini adalah kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

$$NPL = \left(\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil rasio NPL artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola portofolio kreditnya dengan baik, dan bank mampu menyalurkan kredit secara hati-hati (cermat) dan tepat sasaran.

b. Rentabilitas (Profitabilitas)

Rentabilitas (profitabilitas) dijelaskan oleh beberapa rasio antara lain:

- 1) *Nett Interest Margin (NIM)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dan aset produktif.

$$NIM = \left(\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aset Produktif}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar NIM artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola aset produktif secara baik untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang semakin besar.

- 2) *Return on Asset (ROA)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dan aset.

$$ROA = \left(\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar ROA artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola aset secara baik untuk menghasilkan laba sebelum pajak yang semakin besar

- 3) *Return on Equity (ROE)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dan ekuitas.

$$ROE = \left(\frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar ROE artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola ekuitas secara baik untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak yang semakin besar.

- 4) *Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

$$BOPO = \left(\frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil BOPO artinya semakin baik, diartikan bank mampu mengelola biaya operasional secara baik dan efisien efektif untuk menghasilkan pendapatan operasional yang semakin besar.

c. Likuiditas

Likuiditas dijelaskan oleh rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total kredit dan total dana pihak ketiga.

$$LDR = \left(\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \right) \times 100\%$$

Semakin kecil rasio LDR artinya semakin baik, diartikan bank mampu menyediakan dana untuk kewajiban jangka pendek (dana pihak ketiga) yang sewaktu-waktu bisa saja ditarik atau dicairkan oleh nasabah.

d. Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Rasio kecukupan modal dijelaskan oleh CAR. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

$$CAR = \left(\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \right) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio CAR artinya semakin baik, diartikan permodalan bank mampu membiayai aset.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data-data rasio keuangan bank dan data yang diperlukan kemudian dilakukan analisis untuk mengukur hubungan ROA dan CAR terhadap DPR dengan metode analisis regresi yang disebut *Ordinary Least Square* (OLS).

3.2. Obyek dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank BUMN yang telah diaudit dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2019. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, LDR, CAR. Sampel penelitian yaitu empat bank BUMN antara lain BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Y) yaitu DPR, variabel independen (X_1) yaitu rasio *profitabilitas* (ROA) dan variabel independen (X_2) yaitu rasio kecukupan modal (CAR).

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data secara manual untuk menghitung besarnya NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, LDR, CAR, dan PNBPN atau. setoran dividen pemerintah. Kemudian hasil pengolahan data akan disajikan dalam bentuk-bentuk tabel yang mencerminkan penghitungan dan dijelaskan dengan kalimat. Teknik analisis data untuk analisis hubungan ROA dan CAR terhadap DPR dengan menggunakan analisis regresi (OLS).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Aliran modal masuk melalui FDI ke ASEAN mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama sejak tahun 2015 hingga 2018. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2019. Perusahaan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di BEI berjumlah 4 perusahaan yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Periode penelitian sebanyak 10 tahun, maka jumlah data yang diteliti dalam penelitian ini menjadi 40 data laporan keuangan perusahaan.

4.2. Kinerja Keuangan Bank BUMN

Melalui perhitungan rasio keuangan, kinerja keempat bank BUMN tersebut selama 10 tahun terakhir (2010 hingga 2019) sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Keuangan Bank BUMN Tahun 2010-2019

<i>Non Performing Loans (NPL)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	1.11	0.51	0.8	0.5	0.4	0.9	0.4	0.7	0.8	1.2	0.732	1.145
BRI	0.74	0.42	0.41	0.35	0.36	1.22	1.09	0.88	0.92	1.04	0.743	
BTN	2.66	2.23	3.12	3.04	2.76	2.11	1.85	1.66	1.83	2.96	2.422	
Mandiri	0.6	0.5	0.37	0.37	0.44	0.6	1.38	1.06	0.67	0.84	0.683	
<i>Nett Interest Margin (NIM)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	5.78	6.03	5.9	6.2	6.3	6.4	6.4	5.5	5.3	4.9	5.871	6.868
BRI	10.77	9.58	8.42	34.11	8.51	7.85	8	7.92	7.45	6.98	10.959	
BTN	5.99	5.76	5.83	5.44	4.47	4.87	4.98	4.76	4.32	3.32	4.974	
Mandiri	5.39	5.29	5.58	5.68	5.94	5.9	6.29	5.63	5.52	5.46	5.668	
<i>Return on Asset (ROA)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	2.49	2.94	2.9	3.4	3.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.17	2.91	2.851
BRI	4.64	4.93	5.15	0.31	4.74	4.19	3.84	3.69	3.68	2.6	3.777	
BTN	2.05	2.03	1.94	1.79	1.14	1.61	1.76	1.71	1.34	0.13	1.55	
Mandiri	3.5	3.37	3.55	3.66	3.57	3.15	1.95	2.72	3.17	3.03	3.167	
<i>Return on Equity (ROE)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	24.7	20.1	20	22.5	23.6	17.2	17.2	15.6	16.1	14	19.1	20.82025
BRI	43.83	42.49	38.66	5.03	31.22	29.89	23.08	20.03	20.49	19.41	27.413	
BTN	16.56	17.65	18.23	16.05	10.95	16.84	18.35	18.11	14.89	1	14.863	
Mandiri	33.09	25.57	27.23	27.31	25.81	23.08	11.12	14.53	16.23	15.08	21.905	
<i>Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	75.99	72.58	71	67.12	69.78	75.5	75.5	71	70.2	73.2	72.187	70.9455
BRI	70.86	66.69	59.93	60.58	8.51	66.69	68.69	69.14	68.4	70.1	60.959	
BTN	82.39	81.75	80.74	82.19	88.97	84.83	82.48	82.06	85.58	98.12	84.911	
Mandiri	42.4	67.22	63.93	62.41	64.98	69.67	80.94	71.78	66.48	67.44	65.725	
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	70.5	70.37	77.52	85.3	87.8	87.8	87.8	85.6	88.8	91.5	83.299	89.342
BRI	75.2	76.2	79.85	88.54	81.68	86.88	87.77	87.44	88.96	88.64	84.116	
BTN	108.42	102.6	100.9	104.42	108.86	108.78	102.66	103.13	103.5	113.5	105.672	
Mandiri	65.44	71.65	77.66	82.97	82.02	87.05	85.86	89.25	100.2	100.7	84.281	
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	➤ Rata-rata Tiap BUMN	Rata-rata Industri
BNI	18.63	17.63	16.7	15.1	16.2	19.5	19.5	18.5	18.5	19.7	17.996	18.056
BRI	13.76	14.96	16.95	16.99	18.31	20.59	22.91	22.96	21.21	22.55	19.119	
BTN	16.74	15.03	17.69	15.62	14.64	16.97	20.34	18.87	18.21	17.32	17.143	
Mandiri	13.36	15.34	15.48	14.93	16.6	18.6	21.36	21.64	20.96	21.39	17.966	

* Jika rata-rata bank melebihi rata-rata industri, tercetak hijau, jika kurang dari rata-rata industri tercetak merah

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2, rasio NPL Bank BTN lebih tinggi di atas rata-rata bank BUMN artinya BTN mempunyai banyak kredit bermasalah. Rasio NIM BNI, BTN dan Bank Mandiri rendah artinya bank belum mampu mengelola aset secara produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang semakin besar. Rasio ROA dan ROE BNI dan BTN di bawah rata-rata bank BUMN artinya laba sebelum pajak juga tidak besar disebabkan oleh pendapatan

bunga yang tidak besar. Rasio BOPO BNI dan BTN di atas rata-rata bank BUMN artinya bank belum mampu mengelola biaya operasional secara baik dan efisien sehingga mampu menghasilkan pendapatan operasional yang semakin besar. Rasio LDR BTN di atas rata-rata bank BUMN artinya bank mempunyai potensi masalah besar dalam hal likuiditas karena penyaluran kredit yang terlalu agresif. Rasio CAR BNI, BTN, dan Bank Mandiri lebih rendah dari rata-rata bank BUMN artinya permodalan bank belum dikelola dengan baik untuk membiayai aset.

Berdasarkan hasil analisa kinerja keuangan bank BUMN, hanya bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan laba yang besar padahal berdasarkan teori *residual dividend*, pembayaran dividen akan dilakukan apabila perusahaan mempunyai sisa dari laba setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi. Oleh karena itu, guna memaksimalkan PNBPKND atau setoran dividen kepada pemerintah dari laba bank BUMN maka perlu kebijakan teknis pengelolaan PNBPKND dan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja bank BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal dengan memperhatikan profitabilitas BUMN khususnya BUMN yang memberikan kontribusi dividen terbesar.

4.3. Analisis Deskriptif Pengaruh ROA dan CAR Terhadap DPR

Pada bagian ini disajikan hasil statistik deskriptif dari variabel dependen (DPR) maupun variabel independen ROA dan CAR.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	40	0,13	5,15	2,8593	1,15261
CAR	40	13,36	22,96	18,0560	2,60302
DPR	48	0,1700000000	108,183483000	39,12587484	29,50694831
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data olahan SPSS, 2020

4.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi linear dapat dilakukan apabila data pada penelitian ini memenuhi kriteria-kriteria uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, hasil uji autokorelasi, dan hasil uji multikolinearitas.

4.5. Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda dapat disusun sebuah persamaan berikut:

$$DPR = -98,601 + 11,605ROA + 6,220CAR + \varepsilon$$

4.5.1. Pengaruh ROA dan CAR Terhadap DPR (Uji F)

Uji F sebesar 34,792 dengan nilai signifikansi/sig. 0,000. Karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi DPR atau dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR.

Tabel 4. Uji Statistik F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17260.418	2	8630.209	34.792	.000 ^b
	Residual	9177.835	37	248.050		
	Total	26438.253	39			

a. Dependent Variable: DPR

b. Predictors: (Constant), CAR, ROA

Sumber: Data olahan SPSS, 2020

4.5.2. Pengaruh ROA Terhadap DPR (Uji t/Uji Parsial)

Variabel ROA (X_1) terhadap DPR berdasarkan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,514 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil ini menunjukkan H_{a1} diterima. Berdasarkan hasil uji t, perusahaan bank BUMN apabila mampu mengoptimalkan asetnya maka akan memberikan DPR yang lebih besar kepada pemegang saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Perpatih (2016) dan Lanawati dan Amalin (2015) ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR.

Tabel 5. Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-98.601	18.725		-5.266	.000		
	ROA	11.605	2.188	.514	5.304	.000	1.000	1.000
	CAR	6.220	.969	.622	6.420	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Data olahan SPSS

4.5.3. Pengaruh CAR terhadap DPR (Uji t/Uji Parsial)

Uji hipotesis kedua adalah menguji CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil uji t koefisien regresi untuk CAR sebesar 0,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Hasil ini menunjukkan H_{a2} diterima. Berdasarkan hasil uji t, apabila bank BUMN mampu meningkatkan CAR maka akan menambah DPR. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purba (2019), dimana CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR.

4.5.4. Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat hasil *adjusted R-squared* sebesar 0,653. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA dan CAR hanya mampu menjelaskan variabel DPR sebesar 65,3 persen sedangkan 34,7 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Model Summary ^a					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.808 ^a	.653	.634	15.7495900408465	.653	34.792	2	37	.000	1.363

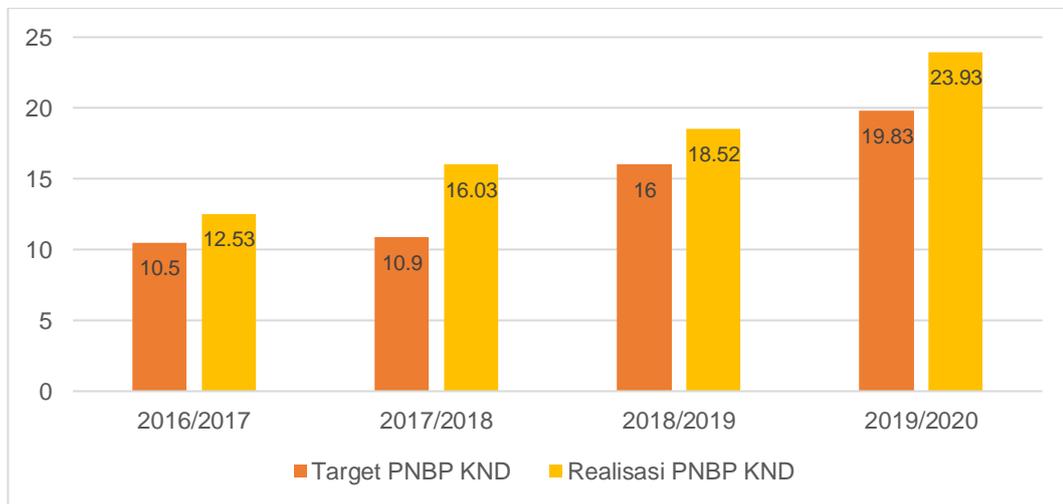
a. Predictors: (Constant), CAR, ROA
 b. Dependent Variable: DPR

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020

4.6. Target dan Realisasi PNBPN KND/ Setoran Dividen Atas Laba Pemerintah BUMN Sektor Perbankan

Berdasarkan Gambar 11, target dan realisasi PNBPN KND/setoran dividen atas laba pemerintah BUMN sektor perbankan tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 selalu melampaui target PNBPN/KND yang diberikan pemerintah sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dijelaskan dalam Nota Keuangan APBN berapa target pemerintah PNBPN KND sektor perbankan. Target PNBPN KND sektor perbankan tahun 2020 berdasarkan Nota Keuangan APBN TA 2020 sebesar Rp19,83 triliun, atas kinerjanya pada tahun buku 2019, BUMN perbankan telah menyetorkan hasil pengelolaan PNBPN KND TA 2020 sebesar Rp23,93 triliun. Realisasi penerimaan PNBPN KND tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 yang selalu melampaui target mengindikasikan adanya kebutuhan pemerintah untuk memformulasi target yang tepat agar penerimaan PNBPN KND BUMN sektor perbankan lebih optimal karena hasil realisasi PNBPN KND selalu lebih besar dari target.

Gambar 4. Target dan Realisasi Setoran PNBPN KND/Setoran Dividen Pemerintah Atas Laba BUMN Sektor Perbankan (dalam triliun Rp)



Sumber: Data diolah

Tabel 12 menunjukkan bahwa realisasi PNBPN KND atau setoran dividen atas laba bagian pemerintah sektor perbankan selama 10 tahun terbesar berasal dari BRI sebesar Rp52,44 triliun, kemudian Bank Mandiri sebesar Rp41,34 triliun, BNI sebesar Rp18,01 triliun dan BTN sebesar Rp2,59 triliun. BRI menjadi kontributor terbesar PNBPN KND. Hal ini disebabkan BRI membukukan

laba yang lebih tinggi tahun buku 2010/2011 sampai dengan tahun buku 2019/2020, begitupula RUPS memutuskan DPR yang cukup tinggi. Sementara itu, BTN membukukan laba paling rendah dengan besaran DPR yang rendah pula sehingga setoran dividen atas laba pemerintah dari BTN tidak besar.

Tabel 7. Kontribusi PNBPKND/ Setoran Dividen Pemerintah Atas Laba BUMN Sektor Perbankan

BUMN	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012	2010/2011
	Laba (dalam miliar)									
BRI	34,372.00	32,351.13	28,996.00	26,196.00	25,398.00	24,176.00	21,160.00	18,521.00	15,083.00	11,472.00
Bank Mandiri	27,482.13	25,015.02	20,020.71	13,071.18	20,104.43	19,871.00	18,204.00	15,504.00	12,246.00	9,218.29
BNI	15,384.48	15,015.11	13,616.47	11,338.74	9,066.58	10,783.00	9,054.00	7,046.00	5,826.00	4,102.00
BTN	209.26	2,807.92	3,056.67	5,631.61	1,811.33	1,145.57	1,562.16	1,363.96	1,186.61	916.00
	Dividen Payout Ratio/DPR (dalam persen)									
BRI	60.00	50.00	45.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00
Bank Mandiri	60.00	54.00	45.00	45.00	30.00	25.00	30.00	30.00	21.61	31.94
BNI	25.00	25.00	35.00	35.00	25.00	25.00	30.00	30.00	20.00	30.00
BTN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00
	Kepemilikan Saham (dalam persen)									
BRI	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75
Bank Mandiri	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
BNI	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
BTN	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	PNBPKND (dalam miliar)									
BRI	11,703.67	9,179.63	7,404.85	5,946.49	4,324.01	4,115.96	3,602.49	3,153.20	1,711.92	1,302.07
Bank Mandiri	9,893.57	6,754.06	5,402.89	3,529.22	3,618.80	2,980.65	3,276.72	2,790.72	1,587.82	1,766.59
BNI	2,307.67	2,252.27	2,859.46	2,381.14	1,359.99	1,617.45	1,629.72	1,268.28	699.00	738.36
BTN	25.11	336.95	366.80	675.79	217.36	137.47	281.19	245.51	142.39	164.88
Jumlah PNBPKND	23,930.02	18,522.91	16,034.00	12,532.64	9,520.16	8,851.53	8,790.12	7,457.71	4,141.13	3,971.90

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 7, pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk bank BUMN tanpa memperhatikan laba bersih lebih besar atau lebih kecil untuk bank BUMN, pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memperhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dan masih terjadi inkonsistensi penetapan DPR antar tahun, yaitu adanya perbedaan laba bersih namun DPR ditetapkan sama pada satu BUMN. Kesulitan pemerintah untuk penentuan target bisa disebabkan oleh penentuan target tahun t dihitung pada awal tahun $t-1$ pada saat BUMN mulai beroperasi pada tahun buku $t-1$ tersebut, estimasi kinerja BUMN sektor perbankan yang digunakan untuk menentukan besaran laba dan DPR dari BUMN perbankan tersebut. Masalah teori keagenan juga muncul ketika pemerintah telah menetapkan target bagian pemerintah atas laba BUMN yaitu manajemen sebagai pengelola keuangan mempunyai kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan bank BUMN hanya bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba

yang besar sehingga penerimaan PNBPKND sektor perbankan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Bila perusahaan bank BUMN mampu meningkatkan CAR dan pengelolaan aset secara bersama-sama maka akan meningkatkan DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X_1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Apabila bank BUMN mampu mengoptimalkan asetnya maka akan memberikan DPR yang lebih besar kepada pemegang saham. Berdasarkan uji t, variabel CAR (X_2) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap DPR. Apabila bank BUMN mampu meningkatkan CAR maka akan menambah DPR. Realisasi PNBPKND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan tahun buku 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 selalu melampaui target PNBPKND atas laba pemerintah. Pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBPKND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memperhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memperhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut BNI, Bank Mandiri, dan BTN perlu memerhatikan kinerja keuangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN untuk mendapatkan laba yang optimal. Efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan dengan cara manajemen perlu mengelola belanja modal dengan hati-hati. BUMN sektor perbankan perlu meningkatkan ROA dengan cara mengoptimalkan asetnya guna untuk meningkatkan DPR. BUMN sektor perbankan juga perlu meningkatkan kesehatan bank guna meningkatkan DPR. Pemerintah dalam optimalisasi PNBPKND perlu merumuskan formulasi target PNBPKND yang tepat agar tidak menjadi beban bagi BUMN namun juga tidak merugikan pemerintah karena target yang rendah. Penetapan DPR hendaknya menggunakan parameter kinerja keuangan yang jelas dan konsisten baik antar BUMN maupun antar tahun.

Daftar Pustaka

- Achmad, Tarmizi & Willyanto K. Kusumo, 2003, "Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia", *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XV, No.1, Juni, pp.54-75.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan* Cetakan I. Bumi Aksara, Jakarta. ISBN: 979-010-582-7
- Ismiyanti, Fitri & Mahadwartha, PA,. 2005. Uji Faktor-Faktor Pembeda Kebijakan Dividen: Analisis Diskriminan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 4, No 1, Maret. <https://doi.org/10.24123/jmb.v4i1.182>

- Karauan, Prisilia. 2017. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Bank BUMN Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*. Jurnal EMBA, Vol.5, No.2, 935-944. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16016>
- Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan APBN Berbagai Tahun.
- Lanawati & Amilin. 2015. *Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Firm Size, Growth dan Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 55- 64. ISSN 2339 - 1545
- Musiega, M. G., Alala, O. B., Douglas, M., Christopher, M. O., & Robert, E. 2013. *Determinants Of Dividend Payout Policy Among Non-Financial Firms On Nairobi Securities Exchange*. Kenya. International journal of scientific & Technology Research, 2(10), 253-266.
- Perpatih, Zuhafni S. 2016. "Pengaruh "ROA" dan "DER" terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, vol. 4, no. 3, 2016, pp. 205-211, doi:10.31846/jae.v4i3.165.
- Purba, Jamian. 2019. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Dividend Payout Ratio pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Ikra-lth Ekonomika, vol. 2, no. 1, Mar. 2019, pp. 49-58.
- Rehman, A., & Takumi, H. 2012. *Determinants of dividend payout ratio: Evidence from Karachi Stock Exchange (KSE)*. Journal of Contemporary Issues in Business Research, 1(1), 20-27.
- Sabri, Fitri Handayani, Dwi Risma Deviyanti, dan Indra Suyoto Kurniawan. 2017. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dividend Payout Ratio Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN*. Print ISSN: 19 07-3011 - Online ISSN: 2528-1127: Vol. 14 (1)
- Silfiana, Merlinda dan Rachmawati, Erny. 2015. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kompartemen, Vol. XIII, No.2, 2015. DOI: 10.30595/kompartemen.v14i1.1370
- Van Horne, James C. and John M. Wachowicz Jr 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.